Radar Bali

Banggar Desak Waktu Khusus

Pembahasan Dana Pilkada

SINGARAJA – Badan Anggaran DPRD Buleleng bakal menyiapkan waktu khusus untuk membahas dana Pemilihan Bupati (Pilbup) Buleleng yang rencananya diselenggarakan pada tahun 2017 mendatang. Pertemuan khusus itu dianggap penting, karena alokasi dana yang dibutuhkan terbilang besar jika harus disediakan dalam satu tahun anggaran, namun berpotensi menghambat pemilihan apabila dianggarkan dalam dua tahun anggaran.

Meski telah dibahas pada tingkat komisi pekan lalu, Badan Anggaran menganggap perlu mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan itu bukan hanya berasal dari KPU Buleleng, namun juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, TNI, Badan Kesbangpol, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, alokasi dana sebesar Rp 70 miliar untuk seluruh tahapan pemilihan bupati, memang terbilang fantastis. Apalagi lima tahun sebelumnya, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 25 miliar. Artinya terjadi kenaikan nyaris tiga kali lipat.

Supriatna yang juga Ketua Banggar DPRD Buleleng itu berpendapat, opsi membagi alokasi dana kedalam dua tahun anggaran, memang terdengar paling realistis dengan kemampuan keuangan daerah saat ini. "Tapi kita kan harus berpikir juga. Apa nanti tidak menghambat jalannya pemilihan. Jangan-jangan nanti panitia ad hoc itu bisa mogok tidak mau melaksanakan kalau tahu baru mendapatkan honor jauh setelah pemilihan dilakukan. Itu kan menghambat jalannya pemilihan" katanya.

EKA PRASETYA/RADAR BALI

Gede Supriatna

Politisi PDI Perjuangan itu juga memiliki kekhawatiran tersendiri jika alokasi dana dilakukan dalam dua tahun anggaran. Dikhawatirkan sejumlah oknum tak bertanggungjawab akan hembuskan isu yang tidak-tidak ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng tak memegang dana, sehingga berpotensi menghambat jalannya tahapan pemilihan.

Apabila pada akhirnya opsi dua tahun anggaran yang diambil, pria asal Desa Tejakula itu meminta pemerintah memberikan jaminan, dana pemilihan bisa dicairkan selambat-lambatnya pada Februari 2017. "Harus ada jaminan, biar masalah anggaran ini tidak dijadikan alat provokasi. Tapi rasa-rasanya sulit, karena selama ini anggaran itu baru bisa cair paling cepat bulan Maret, setelah ada verifikasi dari provinsi," imbuhnya.

Untuk itu pihaknya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan instansi yang terkait dengan tahapan pemilihan itu. Jadwal pertemuan itu akan segera disusun Badan Anggaran bersama dengan Badan Musyawarah DPRD Buleleng, dan sebisa mungkin dilakukan sebelum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dibahas TAPD bersama Banggar. **(eps/rid)**

Edisi : Selasa, 13 Oktober 2015
Hal. : 29

Radar Bali

Kasus Lama Mesti Dibuka Kembali

Agar Tak Terkesan Tebang Pilih

Amlapura (Bali Post) –

Penindakan kasus usaha galian C bodong diharapkan tak tebang pilih. Pelakunya mesti diberikan keadilan. Kalau ada satu atau dua pemilik usaha yang diproses hukum, pemilik usaha galian C lainnya yang juga tidak berizin mesti ditindak demi hukum dan keadilan. Hal itu dilontarkan Ketua Aliansi Peduli Sejahtera Masyarakat (Apisemar) Nyoman Pasek, Senin (12/10) kemarin.

Pasek mengharapkan, Kapolda Bali yang baru membuka lagi kasus pengusaha galian C yang tahun lalu sudah pernah digerebek dan diproses. Pasek mengatakan, tahun lalu sudah ada empat usaha galian C di wilayah Karangasem yang digerebek pihak Reskrimsus Polda Bali. Dari empat usaha itu, dua yang usahanya berupa CV sudah sampai diputus di Pengadilan Negeri Amlapura, dengan masing-masing dihukum percobaan dan ada juga yang dihukum beberapa bulan.

Namun, lanjut Pasek, ada dua pengusaha galian C lainnya dengan perusahaannya berbentuk perseroan terbatas (PT). Justru, kedua perusahaan besar dengan pengusaha yang beroperasi di Kecamatan Selat itu belum terdengar tindak lanjut dari proses hukumnya sampai ke pengadilan. Padahal, sejumlah truknya sudah sempat disita dan terlihat sempat dititipkan di halaman Mapolsektif Rendang.

Pasek menyatakan salut dengan gebrakan Kapolda Bali yang baru. Pihaknya mendengar ada dua orang pengusaha galian C tanpa izin dan mengeruk galian di bawah Desa Tanah Aron Kecamatan Bebandem sudah diperiksa di Mapolda Bali setelah dipanggil ke Mapolda beberapa hari lalu. "Saya salut dengan gebrakan bapak Kapolda Bali yang baru. Namun, mesti berkeadilan dan tak tebang pilih. Pelakunya dari hulu ke hilir mesti ditindak, karena saya melihat sudah sejak lama terjadi pembiaran usaha galian C tanpa izin di Karangasem," katanya.

Pasek menegaskan perlunya penyelamatan lingkungan di Bali, khususnya di Karangasem. Soalnya, Bali itu pulau kecil dan selama ini selain mengandalkan sektor pertanian, juga paling banyak mengandalkan daya tarik wisata berupa seni budaya dan keindahan lingkungan. "Kalau pejabatnya membiarkan terjadi eksploitasi besar-besaran, pertambangan tanpa kendali dan pengawasan, mau dijadikan apa Bali yang kecil ini?" katanya mengkritisi.

Menurut Pasek, orang Bali saat ini mestinya mewariskan Bali yang tetap indah dan menarik kepada generasi penerusnya, bukan mewariskan kerusakan alam. "Kalau sampai galian C tanpa pengawasan dan tanpa pengaturan, apakah Karangasem mau dijadikan seperti bekas galian C Gunaksa Klungkung semua? Bekas galian C Gunaksa setelah pasirnya ludes, tinggal kubangan tanpa bisa dimanfaatkan, meski ada airnya. Nah di Karangasem, tak ada air, tetapi tanah dan pasirnya dikeruk dan dibawa ke luar Karangasem per hari sekitar 4.000 truk. Bagaimana jadinya setelah tanah dan pasirnya habis?" katanya.

Aktivis lingkungan Nyoman Sadra menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, eksploitasi lingkungan dengan pengerukan galian C itu mestinya diatur, dibatasi dan diawasi, bukannya dibiarkan. Sudah ada aturan di mana boleh dan di mana tak boleh dilakukan pertambangan galian C. Mestinya aturan itu ditegakkan guna mengantisipasi jangan sampai malah ke depan lebih banyak orang sengsara karena bencana alam, kekeringan pada musim kemarau dan tanah longsor serta banjir pada musim hujan.

"Turis asing banyak yang protes kepada saya, kenapa dibiarkan terjadi penggalian besar-besaran di lokasi yang indah di kaki dan lereng gunung. Orang asing yang peduli dengan kelestarian lingkungan mempertanyakan hal itu dan kami tak bisa menjawabnya," ujarnya. **(013)**

Edisi : Selasa, 13 Oktober 2015
Hal. : B